

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Sudah bukan menjadi hal baru lagi apabila perihal keselamatan selalu menjadi sorotan dan menjadi bahan evaluasi dari berbagai Negara, khususnya di dunia maritim. Pengaruh sistem keselamatan pada kapal bergantung pada survei dan inspeksi secara berkala dan optimal yang dilakukan oleh *class*, *owner surveyor* dan *port state control* pada setiap negara yang memiliki pelabuhan maupun yang menjadi tujuan perdagangan internasional.

Port state control adalah badan pengawasan negara pelabuhan (*port state*) yang dilakukan oleh pemerintah negara pelabuhan untuk menegakkan ketentuan-ketentuan konvensi yang berlaku di bidang keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan laut serta perlindungan dan kondisi kerja awak kapal di laut,

Port State Control (PSC) mulai terbentuk karena timbul kesadaran dari suatu negara untuk melindungi daerah dari negara tersebut, khususnya sektor maritim dari pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh kapal-kapal lokal maupun kapal-kapal asing yang datang ke negara tersebut. Hal tersebut dilatar belakangi karena banyaknya kegagalan tugas yang dilakukan oleh *Flag State* untuk selalu mengawasi dan menjamin kelaiklautan kapal yang berbendera negara tersebut.

Pada awalnya, *PSC* dimaksudkan sebagai cadangan dari keterbatasan *Flag State* dalam mengawasi kapal-kapal yang berbendera Negara tersebut. Namun, adanya *PSC* telah menunjukkan hal yang positif terkait dengan pengawasan kapal-kapal dibawah standar, terutama jika diselenggarakan secara regional. Tanggung jawab utama untuk standar kapal dimiliki oleh *Flag State*, namun kontrol Negara pelabuhan menyediakan “jaring pengaman” untuk menangkap kapal yang dibawah standar.

IMO telah mendorong pembentukan organisasi regional pada beberapa negara pelabuhan untuk menyusun perjanjian-perjanjian maritim. Hal tersebut memicu munculnya perjanjian/*MoU* (*Memorandum of Understanding*) dari beberapa Negara yang bersangkutan, sebagai contohnya adalah *Paris MoU* (daerah Eropa dan Atlantik Utara), *Tokyo MoU* (daerah Asia dan Pasifik), dll.

Dalam pelaksanaan kegiatan *port state control*, diperlukan peran penting kantor Kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan kelas 1 Tanjung perak surabaya dalam melaksanakan pengawasan keselamatan dan pemeriksaan kapal yang masuk kawasan Indonesia. Kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan kelas 1 Tanjung Perak Surabaya wajib mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh kantor Kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan kelas 1 Tanjung perak Surabaya dalam hal pengawasan keselamatan dan pemeriksaan kapal. Namun dalam kenyataannya pihak Syahbandar memiliki peraturan-peraturan yang berbeda di setiap kantor Syahbandar tidak terkecuali kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Tanjung Perak Surabaya.

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Tanjung Perak Surabaya berusaha untuk mengutamakan tingkat kepuasan pengguna jasa. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan pelayaran kapal baik di dalam negeri maupun ke luar negeri maka diperlukan perhatian khusus dalam penerbitan surat persetujuan berlayar. Oleh karena itu untuk lebih memahaminya, maka dalam menyusun karya tulis ini penulis memilih judul “**FUNGSI *PORT STATE CONTROL* PADA BIDANG KESELAMATAN BERLAYAR, PENJAGAAN DAN PATROLI DI LINGKUNGAN KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS KELAS 1 TANJUNG PERAK SURABAYA**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan pengamatan selama penulis melaksanakan praktek darat di kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Tanjung Perak Surabaya , penulis mengidentifikasi beberapa masalah diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Apa fungsi *port state control terhadap* Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan kelas 1 Tanjung Perak Surabaya
2. Bagaimana pelaksanaan pengawasan keselamatan yang di lakukan oleh *Port State Control* pada bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli di lingkungan Pelabuhan ?
3. Masalah-masalah apa saja yang timbul dalam pengawasan kedatangan kapal oleh *Port State Control* pada bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli di lingkungan Pelabuhan ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Tujuan Penulisan Dalam penulisan karya tulis ini, tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui tentang fungsi *Port State Control* pada bidang keselamatan berlayar, penjagaan dan patroli di lingkungan laut Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya
- b. Untuk mengetahui tentang pelaksanaan penjagaan keselamatan berlayar dan memahami peraturan-praturan yang wajib di lakukan oleh petugas Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas Satu Tanjung Perak Surabaya

- c. Untuk mengetahui masalah-masalah yang kadang timbul dari setiap pelaksanaan tugas *Port state control* dalam pengawasan di lingkungan Pelabuhan Kelas 1 Tanjung Perak Surabaya.

2. Manfaat Penulisan

Dalam pembahasan karya tulis ini, manfaat penulisan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Dapat menggunakan fungsi *Port State Control* pada bidang keselamatan berlayar, penjagaan dan patroli di lingkungan Pelabuhan Kelas 1 Tanjung Perak Surabaya
- b. Dapat melaksanakan penjagaan keselamatan berlayar dan mentaati peraturan-peraturan yang wajib di lakukan oleh petugas Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas kelas 1 Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya
- c. Dapat mengatasi masalah-masalah yang kadang timbul dari setiap pelaksanaan pengawasan yang di lakukan *port state control* di lingkungan Pelabuhan Kelas 1 Tanjung Perak Surabaya.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui gambaran singkat mengenai materi yang di bahas dalam karya tulis ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini Berisi tentang Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penulisan, Metode Pengumpulan Data, Sistematika Penulisan.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKAN

Berisi teori-teori yang digunakan dalam penyusunan Karya Tulis. Baik yang berasal dari buku-buku, jurnal ilmiah maupun media cetak dan online, (presentase penyusunan Tinjauan Pustaka sebesar 25 Persen).

BAB 3: METODOLOGI PENGAMATAN

Berisi gambaran umum objek penelitian (tempat observasi saat pelaksanaan Prada baik diperusahaan ataupun diatas kapal, dilengkapi dengan struktur organisasi dan gambaran kondisi perusahaan kapal yang disesuaikan dengan tema yang dipilih sesuai dengan jurusan).

BAB 4: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

Tahap pembahasan sebuah karya tulis merupakan titikpuncak dari sebuah laporan akhir karya tulis. Hal ini dikarenakan pada bagian ini seluruh rumusan masalah maupun tujuan telah terjawab.

Hasil dari pembahasan dapat disampaikan hasil penulisan

BAB 5: PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan merupakan bagian akhir dimana penulis karya tulis menyimpulkan seluruh pembahasan beserta solusi yang dihasilkan.